

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dinar, Syaiful Ahmad, *KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)* (Jakarta: Cintya Press, 2012).
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Semarang: Sinar Grafika, 2007).
- Herichayono, Ceppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Kaligis, O.C., *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014)* (Bandung: P.T Alumni, 2015).
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Moerad, Poentang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Muhammad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P.T Alumni, 2010).
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada media Group, 2008).
- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012).
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007).
- _____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).
- Nurdin, H. Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2012).

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2005).
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995).
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan II* (Semarang: Yayasan Sudartod/a FH Undip Semarang, 1990).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Wijayanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Jurnal Hukum

- Andi Irawan Haqiqi, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2017).

Tulisan yang Tidak diterbitkan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta, Maret 2015).
- Joko Wuryanto. *Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004).
- Musa Ansari Rambe, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus yang Murni Mengatur Hukum Pidana*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014).

Seminar

Nawawi Arief, Barda, Seminar BPHN: “*Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*”, (Jakarta, 27 November 2007).

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-14-t-di-2016.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup